



Rahmat Sawalman

Analis Legislatif Ahli Pertama
rahmat.sawalman@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Hari Tani Nasional yang diperlakukan setiap 24 September merupakan momentum penting untuk merefleksikan kembali peran strategis petani sebagai penjaga ketahanan pangan sekaligus pilar keadaan bangsa. Pada tahun 2025, peringatan ini tidak hanya dimaknai sebagai bentuk penghormatan terhadap jasa petani, tetapi juga sebagai pengingat akan kompleksitas persoalan yang masih melingkupi sektor pertanian Indonesia. Enam dekade lebih sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, tantangan agraria, kesejahteraan, hingga modernisasi pertanian, belum sepenuhnya terjawab. Peringatan ini menjadi ruang evaluasi kebijakan pangan nasional di tengah dinamika alih fungsi lahan, regenerasi petani yang terhambat, dan ketergantungan impor pangan strategis.

Berbagai tantangan struktural masih dihadapi petani Indonesia. *Pertama*, laju alih fungsi lahan makin mengkhawatirkan. Dekan Fakultas Pertanian IPB, Prof. Suryo Wiyono, menyatakan bahwa luas lahan sawah Indonesia hanya sekitar 7,3 juta hektare, luas yang relatif kecil sehingga menempatkan Indonesia pada peringkat 130 dari 180 negara dalam ketersediaan lahan pertanian per kapita. Dari total tersebut, lebih dari 659 ribu hektare telah beralih fungsi menjadi perumahan maupun perkebunan, dengan laju konversi mencapai 60.000–100.000 hektare per tahun di Jawa, Sumatra, dan Bali. Situasi ini tidak hanya mengancam produksi pangan nasional, tetapi juga berdampak pada rendahnya *Global Food Security Index* Indonesia. *Kedua*, data Sensus Pertanian 2023 menunjukkan hanya sekitar 21,93 persen petani berusia 19–39 tahun, menandakan lemahnya regenerasi di tengah dominasi petani berusia lanjut. *Ketiga*, rendahnya akses terhadap teknologi modern, terbatasnya modal, ketidakstabilan harga hasil panen, serta kerentanan terhadap perubahan iklim memperburuk kondisi kesejahteraan petani. *Keempat*, ketergantungan pada tengkulak dan rantai pasok yang panjang membuat nilai tambah pertanian tidak dinikmati sepenuhnya oleh petani.

Dalam menghadapi tantangan tersebut, penguatan peran petani menjadi agenda strategis untuk menjaga ketahanan pangan nasional. Akses petani terhadap teknologi pertanian modern, seperti *Internet of Things* (IoT), pertanian presisi, dan pemasaran digital, perlu ditingkatkan guna mendorong produktivitas sekaligus menarik minat generasi muda. Kelembagaan petani, seperti koperasi, harus diperkuat agar mampu menyediakan permodalan, memperluas akses pasar, dan menjaga kestabilan harga hasil panen. Di sisi lain, reforma agraria harus dijalankan secara konsisten untuk mengatasi disparitas kepemilikan lahan sekaligus memastikan lahan produktif tidak beralih fungsi, antara lain melalui redistribusi tanah bagi petani. Pendidikan vokasi dan inkubasi bisnis pertanian juga perlu diperluas untuk membangun ekosistem pertanian modern yang adaptif terhadap perubahan iklim dan dinamika pasar. Lebih jauh, upaya penguatan peran petani harus melibatkan kolaborasi lintas sektor. Pemerintah daerah, akademisi, lembaga keuangan, hingga *offtaker* perlu berperan dalam mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia, mempercepat pelepasan varietas unggul, dan memperluas akses pembiayaan dengan bunga yang lebih terjangkau. Afirmasi peran perempuan dalam pertanian juga penting, mengingat kontribusi mereka dalam produksi hingga pengelolaan hasil tani kerap terabaikan.

Pada saat yang sama, kesadaran masyarakat untuk memilih produk lokal perlu ditingkatkan sebagai bentuk keberpihakan terhadap ekonomi petani sekaligus penguatan kedaulatan pangan.

Dengan demikian, Hari Tani Nasional 2025 seharusnya dimaknai sebagai titik balik untuk memperkuat sektor pertanian nasional. Penguatan peran petani melalui kebijakan agraria yang adil, regenerasi berkelanjutan, pemanfaatan teknologi, dan keberpihakan nyata dari negara akan menjadi fondasi utama dalam mewujudkan kedaulatan pangan Indonesia. Momentum ini juga mengingatkan bahwa melindungi lahan pertanian bukan hanya soal menjaga produksi pangan hari ini, melainkan memastikan generasi mendatang tetap memiliki akses terhadap pangan yang cukup, aman, dan terjangkau. Oleh karena itu, sinergi yang lebih erat antara Kementerian Pertanian RI, Komisi IV DPR RI, dan berbagai pemangku kepentingan menjadi kunci dalam memastikan kebijakan yang berpihak pada petani serta menjaga keberlanjutan kedaulatan pangan nasional.

Atensi DPR

Komisi IV DPR RI dapat memberikan attensi melalui pelaksanaan fungsi pengawasan dan anggaran kepada Kementerian Pertanian RI dan *stakeholder* terkait untuk memastikan kebijakan pembangunan pertanian berjalan secara konsisten, berkeadilan, dan berpihak pada petani. Melalui pelaksanaan fungsi pengawasan, Komisi IV DPR RI menegaskan pentingnya pengendalian ketat terhadap praktik alih fungsi lahan, distribusi pupuk bersubsidi, dan pelaksanaan program strategis pertanian agar benar-benar menyentuh kepentingan petani di lapangan. Dari sisi anggaran, Komisi IV DPR RI mendorong pemerintah untuk mengalokasikan anggaran pada peningkatan produktivitas petani melalui penyediaan teknologi, benih unggul, akses pembiayaan murah, serta penguatan kelembagaan tani dan koperasi.

Sumber

antaranews.com, 24 September 2025;
ipb.ac.id, 25 September 2025;
kompas.com, 24 September 2025;
liputan6.com, 24 September 2025;
mediaindonesia.com, 25 September 2025;
melintas.id, 24 September 2025;
merahputih.com, 24 September 2025;
pertanian.go.id, 25 September 2025;
rri.co.id, 24 September 2025.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
EKKUINBANG Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih



<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka_bkdprri

EDITOR

LAYOUTER

Polhukam

Ahmad Budiman
Prayudi
Rachmi Suprihartanti S.
Novianti

Devindra Ramkas O.
Uilly Ngesti Pratiwi
Desty Bulandari
Yustina Sari

EKKUINBANG

Sri Nurhayati Q.
Mandala Harefa
Ari Mulianta Ginting
Eka Budiyanti
Edmira Rivani
Teddy Prasetyawan

Firyal Nabihah
Ulayya Sarfina
Yosua Pardamean S
Jeffrey Ivan Vincent
Fauzan Lazuardi R
Anugrah Juwita S

Kesra

Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola
Yulia Indahri

Timothy Joseph S. G.
Nur Sholikah P. S.
Fieka Nurul Arifa



Bridging Research to Parliament
Evidence Based Policy Making

©PusakaBK2025